

FENOMENA PEMILUKADA, ETIKA POLITIK DAN NILAI MORAL KEKUASAAN¹

Oleh: Moh. Muchtarom²

ABTRAK

R*egional elections in some of the City / County in Indonesia, where the incumbent who has been in power for two terms back ahead in the nomination of the Head of Region, and they are willing to be nominated as deputy head of the region. Or their families are run in order to continue the dynasty of power in the region in order to cover the case that reaches it. How to assess the political ethics of the above cases? and what kind of moral authority that is supposed to run in politics in Indonesia? This paper tried to examine the cases mentioned above with the approach of political philosophy.*

KATA KUNCI: Pemilukada, Etika Politik, Nilai moral, Kekuasaan

¹ Artikel non penelitian

² Dosen Prodi PPKn FKIP UNS

PENDAHULUAN

Pada pelaksanaan PEMILU Kepala Daerah (PEMILUKADA) di beberapa daerah memperlihatkan fenomena menarik. Diantaranya, kenyataan politik penampakan bahwa ada beberapa kepala daerah yang telah menjabat dua kali periode sebagai Bupati/ Walikota, namun tetap ingin maju dalam pencalonan pimpinan daerah.

Hal ini dilakukan agar tetap berada dalam tahta kekuasaan, walaupun harus turun jabatan menjadi wakil kepala daerah. Atau jika tidak dengan cara seperti itu, para mantan pimpinan daerah tersebut “merestui” istri atau anaknya maju dalam pencalonan tersebut. Bahkan ada Bupati yang dinyatakan telah gagal memimpin karena secara nyata tersangkut perkara korupsi tetap maju lagi. Berbeda dengan di negara lain, misal para pejabat di negara Jepang. Ketika mereka tersangkut dengan perkara--walaupun sepele—, secara ksatria mengundurkan diri.

Dalam cerita pewayangan, ada seorang tokoh bernama Abiyasa, dikenal sebagai pemimpin yang *Rancakaprawa* (bijaksana) dan *sutiknaprawa* (empati terhadap penderitaan rakyatnya), serta bergelar *Dewayana* (seperti dewa). Dia adalah seorang raja yang tidak haus dengan kekuasaan. Ketika tugasnya selesai, jabatannya langsung diserahkan kepada Pandu sebagai penerus tahta kerajaan Astina.

Abiyasa lebih memilih untuk melakukan tapa di Wukir Retawu dan bergelar Begawan Abiyasa, hingga dikemudian waktu mampu mencapai tingkatan *ngerti sadurunge winarah* (mengerti kejadian yang akan datang/*futurolog*). Namun, sekarang ini, para

pejabat di Indonesia, jangankan mengundurkan diri, untuk mengakui kesalahan dan kegagalan dalam mensejahterakan rakyat saja tidak dilakukan.

Fenomena di atas menjadi sebuah kajian baru dalam dinamika politik Indonesia, karena pada masa-masa sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Teguh Yuwono menyebutnya sebagai studi baru PEMILUKADA di Indonesia, mereka rela turun pangkat demi kekuasaan. Namun jika ditilik dari teori kekuasaan, menurutnya hal itu merupakan teori lama. Manusia mempunyai sifat purba untuk mempertahankan kekuasaannya selamanya, dia tidak ingin kehilangan akses-akses yang di punya (Suara Merdeka, 18 Oktober 2010).

Secara legal formal apa yang mereka lakukan tidak menyalahi aturan yang ada. Karena dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hanya melarang seorang kepala Daerah menjabat lebih dari dua periode berturut-turut. Pada pasal 58 huruf (o) yang berbunyi, “calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Indonesia yang belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama.” Artinya undang-undang ini tidak melarang jika calon wakil kepala daerah itu sebelumnya adalah Kepala daerah baik pada daerah setempat maupun dari daerah lain. “secara hokum tidak ada yang salah, namun mereka harus melawan norma, etika, dan kepantasan berpolitik.

Para penyelenggara negara butuh legitimasi kekuasaan melalaui

PEMILU/KADA. Dengan kekuasaan yang ada ditangannya, mereka mengatur dan mengendalikan negara dan masyarakat, dilain aspek kekuasaan menjadi sarana untuk mempertahankan dinasti pribadi atau kelompok. Bahkan kekuasaan dapat digunakan untuk menumpuk kekayaan, memperkuat oligarki dan melindungi segala kepentingannya.

Namun, dalam merengkuh kekuasaan dan penyelenggaraannya agar tidak menyimpang dari nilai moral harus dilandasi dengan etika politik. Hal ini diperlukan agar kepatutan dalam berpolitik dan *clean governance* tetap menjadi tujuan dalam aktifitas berpolitik bukan kekuasaan semata yang menjadi tujuan.

Fenomena perpolitikan di Indonesia cenderung mengarah kepada politik kekuasaan. Gejala-gejala yang muncul sekarang ini, menunjukkan etika berpolitik tidak dipandang sebagai sesuatu yang urgen. Tidak sedikit para politisi lebih mementingkan kekuasaan dibanding moralitas berpolitik dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan segala cara, seperti *money politic*, politik intimidasi, dan lain-lain.

DEFINISI KEKUASAAN

Kekuasaan menurut Miriam Budiarto (2005) adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau sekelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ramlan Surbakti

(1999), kekuasaan adalah kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhinya. Sedangkan menurut Morgenthau, kekuasaan sebagai kemampuan seseorang untuk mengendalikan pikiran dan tindakan orang lain.

Pengertian yang lebih sempit, yaitu tentang kekuasaan politik menurut Miriam Budiarto (2005) adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah), baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Lebih khusus lagi Ramlan Surbakti (1999) mendefinisikan kekuasaan politik sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya, kelompoknya ataupun masyarakat pada umumnya.

Dari kedua istilah di atas nampaknya antara Miriam Budiarto dan Ramlan Surbakti sepakat, bahwa kekuasaan politik dipergunakan untuk mempengaruhi setiap kebijakan politik yang bertujuan untuk mendapatkan kebaikan/ keuntungan bagi diri, kelompok dan yang lebih utama adalah kebaikan masyarakat. Dengan demikian, seharusnya kekuasaan dapat memberikan kesejahteraan bagi semua rakyat.

KEKUASAAN BERMORAL

Maraknya para *incumbent* yang bermasalah atau keluarganya yang maju lagi dalam Pemilukada menunjukkan

moralitas penguasa bukan lagi menjadi syarat untuk berkuasa. Bahkan yang paling menohok rasa keadilan adalah kasus Kabupaten Boven Digul, Bupati yang masih menjabat sudah divonis sebagai tersangka kasus korupsi dan telah ditahan dapat memenangkan pemilukada..

Demokrasi Indonesia telah gagal melahirkan politisi yang memiliki keutamaan politik (*political virtues*) atau karakter mulia yang memungkinkan mereka bertindak secara bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, kelompok, partai, serta upaya sadar pelanggaran kekuasaan. Apa yang salah sehingga para pemimpin bangsa kita yang terhormat seakan kehilangan karakter unggul dan keutamaan moral, memprioritaskan kebaikan dan kesejahteraan masyarakat yang mereka wakili dan pimpin?

Menurut peneliti senior *Indonesian Corruption Watch* (ICW) Abdullah Dahlan, perilaku seperti itu merupakan upaya untuk menguasai akses, aset, dan proyek di daerah, juga demi menyuburkan oligarki politik. Bagi kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi, jelas akan lebih aman jika masih menjabat karena terlindungi Surat Ijin Pemeriksaan Presiden. Atau akan terus dilindungi oleh kolega-koleganya sesama kepala daerah, keluarganya (istri atau anaknya) yang menjadi pimpinan daerah, dan struktur partai di tingkat pusat (Suara Merdeka, 18 Oktober 2010).

Dampak lainnya adalah menampilkan kegagalan partai politik melakukan kaderisasi kepemimpinan dengan bersikap pragmatis, hanya memilih calon yang bermodal besar dan

hanya berpikir asal menang, namun mengebiri hak-hak kadernya sendiri.

Itulah misteri kekuasaan kata Hasyim Asy'ari (Suara Merdeka, 18 Oktober 2010). Dengan kekuasaannya kepala daerah dapat melakukan apa saja sesuai kehendaknya dengan segenap instrumen dan sumber daya yang dimiliki. Seorang kepala daerah berwenang menunjuk siapa saja yang menjadi kepala dinas.

Namun dalam politik ada keyakinan "*there is no free lunch in politics*". Ini yang mungkin menjadi salah satu sumber "pendapatan" di luar gaji seorang kepala daerah. Itu hanya salah satu contoh, masih banyak contoh lain jika diteruskan. Secara kasat mata, realitas itu menuntun kita membuka tabir misteri kekuasaan, yaitu berlakunya hukum alam politik "*money get to power and than gets more money*".

Kekuasaan membuat kecanduan, mirip dengan kecanduan rokok. Seorang yang berkuasa dalam kurun waktu yang lama akan kecanduan kekuasaan, yang membuat hidupnya menjadi tidak normal jika tidak menggenggam kekuasaan. Ketergantungan pada kekuasaan membuat seorang penguasa menjadi terlalu sensitif pada kekuasaannya. Kritik atau sikap yang berlawanan dengan kekuasaannya yang datang dari orang lain akan dipandang sebagai usaha menjatuhkan kekuasaannya, tidak *legowo* jika digantikan oleh orang lain. Kalaupun harus digantikan masih berkaitan dengan menjaga kepentingannya.

Menurut Musa Asy'ari (Kompas, 16 Januari 2010) *nyandu* kekuasaan sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada *nyandu* narkoba,

karena akan berdampak “sistemik” bagi kehidupan masyarakat. Seorang penguasa atau pejabat yang *nyandu* kekuasaan akan melahirkan kebijakan dan tindakan yang korup, yang hanya menguntungkan dirinya dan kelompoknya, kemudian merugikan yang lainnya dan dapat mengganggu kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Demokrasi politik yang berlandaskan kepada etika politik menjadi solusi menghadapi keruwetan kekuasaan. Karena dalam demokrasi politik kekuasaan harus selalu dikontrol secara ketat agar penguasa tidak “memiliki” kekuasaan. Seorang penguasa juga harus bersikap demokratis, terbuka dan bersikap positif dalam mengantarkan generasi pemimpin berikutnya. Etika politik memberikan landasan etis dan tingkah laku bermoral para penguasa.

Tanggung jawab moral dan politik yang berkeutamaan sebagai bagian hakiki dari setiap praktik politik ketika kebaikan dan kesejahteraan masyarakat menjadi taruhannya. Tetapi tampaknya keyakinan ini berubah menjadi semacam pesimisme politik ketika para pemegang kekuasaan mempraktikkan kekuasaan tanpa tanggung jawab politik, katakan saja ketidakpekaan pada kepentingan publik, pemerayaan diri, atau upaya pelanggaran kekuasaan, dan sebagainya. Dalam kondisi demikian, pandangan klasik bahwa konsumerisme telah menganeksasi wilayah keutamaan moral dan mengaburkan kemampuan membedakan *moral excellence* dari moralitas binatang yang mengutamakan kenikmatan dapat diterima. Akibatnya, alih-alih mengutamakan kepentingan

masyarakat yang mereka pimpin, para penguasa menghapus tanggung jawab moral dan politik dari kamus kekuasaan mereka.

Dalam *textbook* filsafat politik, ada pemikiran kekuasaan sebagai tujuan politik yang dikembangkan oleh Niccollo Machiavelli yang menyatakan bahwa seorang penguasa harus memiliki dua watak, yaitu watak manusia dan binatang. Untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan penguasa harus mengedepankan watak binatangnya yang buas dan kejam.

Sedangkan untuk menarik simpati rakyat penguasa harus menggunakan pendekatan-pendekatan humanisme. Machiavelli menolak tegas doktrin Thomas Aquinas tentang gambaran penguasa yang baik. Aquinas dalam karyanya *The Government of Princes* berpendapat bahwa penguasa yang baik harus menghindari godaan kejayaan dan kekayaan-kekayaan duniawi agar memperoleh ganjaran surgawi kelak (Suhelmi, 2001: 133).

Bagi Machiavelli sebaliknya, penguasa yang baik harus berusaha mengejar kekayaan dan kejayaan karena keduanya merupakan nasib mujur yang dimiliki seorang penguasa. Dan nampaknya para penguasa di Indonesia memiliki persepsi seperti ini, sehingga benar apa yang disampaikan oleh Musa Asy'ari, banyak pemimpin kita yang kecanduan kekuasaan.

Bagi Machiavelli kekuasaan adalah *raison d'être* negara. Negara menjadi simbolisasi tertinggi kekuasaan politik yang sifatnya mencakup semua (*all embracing*) dan mutlak (ibid). Pendapat Machiavelli inilah yang kemudian menjadikan beberapa sarjana

berkesimpulan, bahwa dia memiliki obsesi terhadap negara kekuasaan (*maachstaat*) dimana kedaulatan tertinggi terletak pada kekuasaan penguasa bukan rakyat dan prinsip-prinsip hukum (*reechstaat*).

Namun, dalam filsafat politik orang tidak hanya berhenti pada cara berpikir monokausal (meminjam istilah dari Frans Magnis Suseno). Kita diajak mencari hakikat politik, meneliti sumber dan dasarnya, menganalisis beragam sistem politik, yang riil dan yang mungkin; menspesifikasikan tujuan-tujuan politik; menentukan kategori-kategori institusional dan rezimnya.

Eric Weil, yang mengambil posisi bertentangan dengan Machiavelli, mengatakan bahwa filsafat politik merupakan suatu gerak yang berangkat dari moral dan melampauinya dalam teori tentang negara (Haryatmoko, 2004: 23). Tentu saja politik bukan seperti yang dipahami politikus, tetapi yang dimengerti oleh orang yang mencari makna dan nilai di dalam politik. Jadi perlu ditunjukkan dan diperjelas bahwa filsafat politik berangkat dari moral. Moral adalah segala-galanya, sedangkan negara atau kekuasaan adalah alat bukan tujuan.

ETIKA POLITIK DAN KEKUASAAN BERBASIS MORAL EXCELLENCE

Utsman Bin Affan pernah berkata, “apabila Al-Qur’an tidak mampu membendung kedzaliman, maka kekuasaanlah yang akan menumbangkannya”. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan hendaknya dipergunakan untuk menegakan moralitas bangsa, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Dan dalam

berpolitik harus mengedepankan etika politik.

Apakah etika politik itu? Etika politik menjadi salah satu cabang pembahasan etika dalam lingkungan filsafat. Filsafat dibagi menjadi dua cabang, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis (Suseno, 1987: 12). Filsafat teoritis melingkupi kajian tentang manusia, alam, hakikat realitas, pengetahuan, dan yang Transenden. Sedangkan filsafat praktis diwujudkan dalam bentuk etika, termasuk etika politik.

Menurut Frans Magnis Suseno (1987: 14) etika politik adalah tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia—dan bukan hanya sebagai warga negara—terhadap negara, hukum yang berlaku, dan lain sebagainya. Artinya kebaikan manusia sebagai manusia dan kebajikannya sebagai warga negara tidak identik. Sebagaimana Aristoteles menyebutkan bahwa identitas antara manusia yang baik dan warga negara yang baik hanya terdapat apabila negara sendiri baik.

Namun, Filsuf moral seperti Alasdair Macintyre jauh-jauh hari mengingatkan kita, bahwa etika politik yang atau kekuasaan bermoral akan sulit diejahwantahkan di zaman liberal ini persis ketika kita terjebak dalam fragmentasi nilai-nilai moral. Pertanyaan kritis yang diajukan adalah prinsip moralitas umum apakah yang dirujuk sebagai pembeda sebuah kekuasaan bermoral?

Pertanyaan ini persis menggugat keyakinan pada tanggung jawab politik ketika etika politik tidak menjadi satunya-satunya prinsip penjelas tingkah laku, apalagi etika deontologi

(menekankan kewajiban sebagai prinsip penentu baik dan buruknya tindakan) atau etika utilitarisme (menekankan kebaikan semakin banyak orang sebagai prinsip penjustifikasi tindakan moral). Konsekuensinya, praktik politik yang memuja kenikmatan, kekayaan pribadi, perpetuasi kekuasaan, atau pertimbangan-pertimbangan pragmatis-jangka pendek seolah-olah memiliki hak eksis yang sama seperti halnya kekuasaan yang bermoral dan berkeutamaan.

Adagium *Power tends to corrupt* dan *Ethics has no place in politics* adalah pernyataan yang ingin menunjukkan betapa mudahnya kita terperangkap pada kecenderungan berpolitik tanpa etika. Sebaliknya, adagium ini pulalah yang membuat kita untuk selalu tidak jenuh dan letih meneriakkan perlunya etika politik dalam mengemban tugas dan tanggung jawab bermasyarakat dan bernegara. Dalam teori politik, etika politik bukanlah sekadar gagasan himbauan moral yang naif bila dikaitkan dengan kehidupan politik praktis seperti sinyalemen adagium di atas. Menurut Kastorius Sinaga (Hamengkubuwono x, www.setneg.go.id), minimum ada tiga prinsip yang secara metodologis dapat dijadikan untuk mengukur muatan etika politik dari sebuah politik atau pun kebijakan publik:

Pertama, prinsip kehati-hatian (*principle of prudence*), sebuah prinsip yang “mempertanyakan” secara kritis tentang latar belakang berikut “pemihakan” dari sebuah tindakan ataupun kebijakan dari para pemegang kunci kekuasaan politik. Dalam prinsip ini, sebuah tindakan yang memiliki motif untuk “memihak” kepentingan lebih luas

dibanding dengan kepentingan sempit partai atau diri sendiri akan memiliki nilai etika yang jauh lebih tinggi dan terpuji.

Kedua, prinsip tatakelola (*principle of governance*) yang berhubungan dengan masalah etika di dalam “proses” pengambilan keputusan ataupun penentuan tindakan. Prinsip ini menyangkut pengukuran terhadap standar-standar yang digunakan di dalam menentukan sebuah tindakan ataupun kebijakan. Kesadaran akan pentingnya akuntabilitas, transparansi dan soladiritas, secara otomatis, akan melahirkan perilaku dan keputusan yang jauh lebih etis.

Ketiga, prinsip pilihan rasional (*principle of rational choice*) yang secara metodologis menimbang secara seksama atas manfaat dan biaya (*costs and benefits*) dari sebuah tindakan ataupun kebijakan dalam rangka kepentingan umum. Sebuah tindakan atau keputusan yang memiliki manfaat yang sangat tinggi dan signifikan bagi kepentingan umum jauh lebih etis dibanding tindakan yang hanya melayani kepentingan pribadi ataupun kepentingan manuver partai politik yang sesaat.

Sultan Hamengkubuwono X (www.setneg.go.id) juga menawarkan tiga muatan etika politik. *Pertama*, watak baru yang berakar budaya, berwatak progresif dan memihak bangsa. *Kedua*, kebhinnekaan, kebersamaan, kerukunan, dan kebangsaan Indonesia perlu dirajut ulang serta Pancasila ditegakkan kembali. *Ketiga*, membela rasa keadilan rakyat, mengabdikan Ibu Pertiwi demi kesejahteraan rakyat dan kemuliaan Negara.

PENUTUP

Politik yang didasari dengan etika atau nilai moral kekuasaan harus terus digaungkan, karena membutuhkan proses yang panjang tidak instan sekali jadi, sama ketika keutamaan moral individu harus diusahakan terus-menerus. Dibutuhkan latihan dan kemampuan mempraktikkan nilai-nilai moral luhur dalam praktik politik sampai terbentuk sebuah kultur politik yang meletakkan keutamaan dan moral sebagai bagian hakiki dari politik itu sendiri.

Di sinilah sebenarnya kita mengerti mengapa para politisi yang kredibel dan memiliki integritas moral cukup memadai, tampak tidak berdaya mempertahankan idealism politiknya ketika masuk ke dalam jaringan kekuasaan. Di tengah fragmentasi nilai dan prinsip moral serta lemahnya kehendak (*will*) politisi mempertahankan idealisme politik serta cita-cita moralnya, kita perlu membangun apa yang Garrath Williams istilahkan sebagai *circumstances of responsibility* (2008: 457). Logikanya sesederhana filosofi pendidikan karakter. Dengan terus mengingatkan para politisi dan penguasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang diwakili atau dipimpinnya, kita sebenarnya mendesak mereka untuk mempraktikkan politik yang bermoral. Praktik politik yang bermoral, jika dilakukan secara nyata dan konsisten, akan membentuk sebuah budaya politik atau *circumstances of responsibility* tadi. Biasakan bagi penguasa untuk menerima kritik dan hujatan pengamat, aksi dan demonstrasi massa, serta liputan mendalam media massa yang memang harus gencar dilakukan sebagai bagian

dari upaya membangun kultur politik yang berkeutamaan atau bermoral tadi.

Setiap anak bangsa harus tetap optimis melihat adanya harapan membangun sebuah kultur politik yang berkeutamaan di Republik ini. Hanya saja sekarang usaha ini harus lebih digiatkan lagi, mengingat tingkat keparahan praktik politik tak bermoral di Republik ini, ketika korupsi merajalela, mafia hukum dipertontonkan secara kasat mata, dan keadilan masih jauh dari cita-cita. Sambil berharap praktik politik tak bermoral belum menjadi monumen, kita menginginkan para wakil rakyat dan penguasa memiliki tekad merevitalisasi nilai-nilai luhur Pancasila dan menjadikannya sebagai prinsip dasar atau rasionalitas bersama dalam praktik politik di negara kita. Jika tidak demikian, kita melanggengkan fragmentasi nilai dan prinsip moral sekaligus kehilangan pegangan prinsip bersama pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal terakhir ini mengandung risiko teramat besar apabila negara dikelola tanpa prinsip moral yang jelas. Masihkah terwujud kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan negara yang demikian?

Akhir kata, mari kita mengingat apa yang disampaikan oleh Dale F. Eickelmen, "*bahwa praktik politik dalam hal seni bernegosiasi dalam mewujudkan tatanan sosial yang baik dan tepat, perlu ditopang oleh budaya dan perilaku sehat yang bersendikan moralitas*".

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, Hasyim. *Misteri Kekuasaan*, dalam Suara Merdeka, 18 Oktober 2010
- Asy'ari, Musa. *Candu Kekuasaan*, dalam Kompas, 16 Januari 2010
- Budiardjo, miriam. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Haryatmoko. (2004). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas
- Suhelmi, Ahmad. (2001). *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Surbakti, Ramlan. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Suseno, Frans Magnis. (1987). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia
- Williams, Garrath. (2008). *Ehics Theory and Moral Practice*.
Suara Merdeka, 18 Oktober 2010
www.setneg.go.id
- UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah